

Pendidikan Islam Inklusif: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

Sumianti Sumianti¹, Bayu Mujrimin², Zulaekah Zulaekah³

¹Universitas Islam Jakarta, Indonesia

²STAI Ibnu Sina Batam, Indonesia

³STIT Mumtaz Karimun, Indonesia

Email: ¹sumianti@uis.ac.id, ²bayumuhsinin10@gmail.com, ³zulaekahekha@gmail.com

Received:

05 November 2025

Revised:

12 Desember 2025

Accepted:

23 Januari 2026

Published:

11 Februari 2026

ABSTRACT

Keywords:

Comparative Study; Inclusive Islamic Education; Nurcholish Madjid; Pluralism; Abdurrahman Wahid

This study examines the concept of inclusive Islamic education through a comparative analysis of the educational thought of Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid (Gus Dur), two influential Muslim intellectuals whose ideas have significantly shaped contemporary Islamic discourse in Indonesia. The study aims to identify the convergences and divergences in their perspectives on educational objectives, curriculum orientation, learning approaches, and the role of Islamic education in fostering an inclusive and pluralistic society. A qualitative approach was employed using library research and comparative content analysis of the primary works of both scholars, supported by relevant secondary literature. The findings reveal that both thinkers reject formalistic and exclusive interpretations of Islamic education and instead advocate an educational model grounded in openness, humanity, and contextual understanding of Islamic teachings. Nurcholish Madjid emphasizes rationality, intellectual freedom, and the integration of religious and modern knowledge, whereas Abdurrahman Wahid highlights pluralism, social justice, local wisdom, and the transformative role of pesantren. Despite their different emphases, both share a common vision of Islamic education as a means of cultivating democratic, tolerant, and socially responsible individuals. This study contributes to enriching contemporary discourse on inclusive Islamic education and provides a conceptual foundation for developing educational practices responsive to the challenges of multicultural societies.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Studi Komparatif; Pendidikan Islam Inklusif; Nurcholish Madjid; Pluralisme; Abdurrahman Wahid

Pendidikan Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah meningkatnya keberagaman sosial, menguatnya polarisasi, dan berkembangnya tuntutan terhadap praktik pendidikan yang lebih inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai pendidikan Islam inklusif, terutama berkaitan dengan tujuan pendidikan, orientasi kurikulum, metodologi pembelajaran, serta peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang demokratis dan plural. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dengan analisis isi komparatif terhadap karya-karya primer kedua tokoh yang didukung oleh berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua tokoh sama-sama menolak formalisme dan eksklusivisme dalam pendidikan Islam serta menempatkan nilai keterbukaan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai fondasi pendidikan. Nurcholish Madjid lebih menekankan rasionalitas, kebebasan berpikir, dan integrasi ilmu keislaman dengan ilmu modern, sedangkan Abdurrahman Wahid menonjolkan pluralisme, keadilan sosial, kearifan lokal, serta peran pesantren dalam membangun masyarakat yang inklusif. Persamaan dan perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Islam inklusif tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk warga yang toleran, adaptif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat multikultural. Penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran pendidikan Islam Indonesia sekaligus menawarkan landasan konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap tantangan kontemporer.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan berkembangnya globalisasi, transformasi digital, serta meningkatnya mobilitas sosial masyarakat (Jamil et al., 2025; Tumiran et al., 2024; Wulandari et al., 2024). Perubahan tersebut membuka ruang interaksi yang lebih luas antarkelompok, budaya, dan tradisi keagamaan, tetapi pada saat yang sama juga memunculkan berbagai persoalan baru berupa polarisasi sosial, intoleransi, eksklusivisme keagamaan, hingga berkembangnya narasi ekstremisme yang memanfaatkan ruang digital (Auzi et al., 2024; Mahrus & Itqon, 2024; Mandala et al., 2024). Situasi ini menempatkan pendidikan Islam pada posisi yang strategis, bukan hanya sebagai sarana transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter yang mampu menumbuhkan sikap terbuka, kritis, moderat, dan menghargai keberagaman (Fatmawati et al., 2023; Jamil et al., 2025).

Fenomena polarisasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak lagi terbatas pada aspek penguasaan ilmu pengetahuan, melainkan juga berkaitan dengan pembentukan cara pandang peserta didik terhadap perbedaan. Menguatnya identitas keagamaan yang bersifat eksklusif sering kali diikuti oleh berkurangnya ruang dialog, meningkatnya prasangka antarkelompok, serta munculnya kecenderungan memahami ajaran agama secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya (Nurhidayah & Supratno, 2023; Al-Razi et al., 2024; Juliani et al., 2024). Kondisi demikian diperkuat oleh algoritma media digital yang membentuk *echo chamber*, sehingga peserta didik semakin jarang berinteraksi dengan pandangan yang berbeda. Pendidikan Islam dituntut mampu menghadirkan proses pembelajaran yang tidak hanya memperkuat identitas keagamaan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, berdialog, dan membangun kehidupan bersama dalam masyarakat yang plural (Mundiri et al., 2025; Prasetyowati et al., 2025)

Dalam konteks tersebut, konsep pendidikan Islam inklusif memperoleh relevansi yang semakin kuat. Inklusivitas bukan sekadar menunjukkan sikap menerima keberagaman, melainkan menjadi paradigma pendidikan yang memandang perbedaan sebagai realitas sosial yang harus dikelola melalui penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Prinsip tersebut memiliki landasan yang kokoh dalam ajaran Islam melalui nilai *rahmatan lil 'alamin, tasamuh, tawassut, tawazun*, dan *'adalah* yang menempatkan penghormatan terhadap sesama manusia sebagai bagian dari implementasi ajaran agama (Rahman & Azzahra, 2024; Ridwan et al., 2025; Sirojuddin et al., 2025). Pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang memiliki kedalaman spiritual sekaligus kesiapan menghadapi masyarakat multikultural.

Implementasi pendidikan Islam inklusif memerlukan perubahan tidak hanya pada substansi kurikulum, tetapi juga pada pendekatan pembelajaran dan budaya akademik yang berkembang di lembaga pendidikan. Kurikulum perlu memberikan ruang bagi dialog, pemikiran kritis, serta pemahaman yang kontekstual terhadap ajaran Islam. Proses pembelajaran juga perlu mengakomodasi keberagaman pengalaman peserta didik dan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang menghargai perbedaan sebagai sumber pembelajaran. Pendekatan semacam ini diyakini mampu memperkuat moderasi beragama sekaligus menjadi salah satu strategi preventif terhadap berkembangnya sikap intoleran dan radikal di lingkungan pendidikan (Jamil et al., 2025; Mundiri et al., 2025; Prasetyowati et al., 2025; Sirojuddin et al., 2025).

Di Indonesia, gagasan mengenai pendidikan Islam yang inklusif berkembang melalui pemikiran sejumlah intelektual Muslim, di antaranya Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Kedua tokoh tersebut sama-sama menawarkan pembaruan pemikiran Islam yang

menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun masyarakat yang demokratis, toleran, dan berkeadaban. Meskipun memiliki tujuan yang sejalan, keduanya mengembangkan landasan epistemologis yang berbeda. Nurcholish Madjid lebih menitikberatkan pada rasionalitas, kebebasan berpikir, serta pembaruan intelektual sebagai prasyarat kemajuan umat Islam (Lidyaningsih & Hanif, 2023; Pratama, 2023). Pemikirannya berusaha menghubungkan nilai-nilai dasar Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan modernitas sehingga pendidikan mampu melahirkan pribadi Muslim yang terbuka, kritis, dan kosmopolitan.

Berbeda dengan Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid membangun paradigma pendidikan Islam melalui pendekatan sosial-kultural yang berakar pada tradisi pesantren, pluralisme, serta penghormatan terhadap kearifan lokal (Pratama, 2023). Pendidikan menurut Gus Dur tidak hanya berfungsi mentransmisikan ilmu keagamaan, tetapi juga membentuk kesadaran kemanusiaan yang mampu menghargai keberagaman, memperjuangkan keadilan sosial, dan melindungi kelompok-kelompok yang berada pada posisi rentan. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat yang majemuk tanpa kehilangan substansi ajaran agama

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pemikiran Nurcholish Madjid maupun Abdurrahman Wahid secara terpisah, sebagian besar masih berfokus pada isu pembaruan Islam, pluralisme, demokrasi, atau moderasi beragama. Kajian yang secara khusus membandingkan konstruksi pendidikan Islam inklusif kedua tokoh melalui dimensi tujuan pendidikan, orientasi kurikulum, metodologi pembelajaran, serta peran pendidikan dalam membangun masyarakat plural masih relatif terbatas. Akibatnya, belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan paradigma kedua tokoh tersebut dapat saling melengkapi dalam merumuskan model pendidikan Islam yang relevan dengan tantangan masyarakat kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif pemikiran pendidikan Islam inklusif Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid untuk mengidentifikasi titik temu, perbedaan, serta relevansi kedua perspektif dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka komparatif yang mengintegrasikan pemikiran kedua tokoh ke dalam satu model konseptual pendidikan Islam inklusif yang tidak hanya berorientasi pada penguatan identitas keagamaan, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang demokratis, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif berbasis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai pendidikan Islam inklusif melalui penafsiran terhadap gagasan, argumentasi, dan konstruksi konseptual yang tertuang dalam karya-karya mereka (Ahmed, 2024; Creswell & Poth, 2023). Studi komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta karakteristik khas pemikiran kedua tokoh dalam merumuskan paradigma pendidikan Islam yang responsif terhadap keberagaman masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid yang membahas pendidikan Islam, pluralisme, demokrasi, kebudayaan, dan pembaruan pemikiran Islam. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan berbagai publikasi akademik yang relevan dengan tema pendidikan Islam inklusif (Almusaed et al., 2025). Pengumpulan data

dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyeleksi berbagai literatur sesuai fokus penelitian (Ahmed et al., 2025).

Analisis data menggunakan teknik *content analysis* yang dipadukan dengan pendekatan komparatif (Miles et al., 2018). Proses analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi konsep, serta perbandingan terhadap empat aspek utama, yaitu tujuan pendidikan, orientasi kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang inklusif. Untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian, interpretasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai karya primer dan literatur pendukung, serta mempertimbangkan konteks historis dan intelektual yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran kedua tokoh sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis komparatif terhadap pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid mengenai pendidikan Islam inklusif. Analisis dilakukan dengan menelaah karya-karya utama kedua tokoh untuk mengidentifikasi fondasi filosofis, orientasi pendidikan, konsep kurikulum, metodologi pembelajaran, serta relevansinya dalam menjawab tantangan pendidikan Islam kontemporer. Pembahasan tidak hanya mendeskripsikan gagasan masing-masing tokoh, tetapi juga mengkaji titik temu, perbedaan paradigma, serta kontribusinya terhadap pengembangan model pendidikan Islam yang inklusif di tengah masyarakat plural.

Konsep Dasar Pendidikan Islam sebagai Landasan Pendidikan Inklusif

Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang bertujuan mengembangkan dimensi intelektual, spiritual, moral, dan sosial secara seimbang. Berbeda dengan paradigma pendidikan yang berorientasi pada penguasaan pengetahuan semata, pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan (Fatmawati et al., 2023; Nurhidayah & Supratno, 2023; Prasetyowati et al., 2025). Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui capaian akademik, tetapi juga melalui terbentuknya karakter, kematangan spiritual, serta kemampuan hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk.

Secara konseptual, istilah pendidikan Islam sering dijelaskan melalui tiga terminologi utama, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Ketiganya menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan adab, pengembangan potensi, dan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan peserta didik. Konsep *ta'dib* memperoleh perhatian yang cukup besar karena dianggap mampu mengintegrasikan dimensi pengetahuan, etika, dan pembentukan kepribadian dalam satu kesatuan yang utuh.

Orientasi tersebut kemudian melahirkan tujuan pendidikan Islam yang tidak berhenti pada pembentukan individu yang saleh secara personal, tetapi juga individu yang mampu menghadirkan kemaslahatan sosial. Pendidikan diarahkan untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa, memiliki kemampuan berpikir kritis, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan fungsi kekhalifahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki dimensi transendental sekaligus dimensi sosial yang saling melengkapi.

Perspektif tersebut menjadi titik awal lahirnya gagasan pendidikan Islam inklusif. Ketika tujuan pendidikan dipahami sebagai proses memanusiakan manusia secara utuh, maka keberagaman bukan dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas sosial yang harus

dikelola melalui pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dituntut mampu membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran religius sekaligus kemampuan berdialog dengan berbagai perbedaan budaya, agama, maupun pandangan hidup. Paradigma ini memperlihatkan bahwa inklusivitas bukan merupakan konsep yang berasal dari luar Islam, melainkan berkembang dari tujuan dasar pendidikan Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Perkembangan masyarakat global semakin memperkuat kebutuhan tersebut. Transformasi digital, mobilitas sosial, dan meningkatnya interaksi lintas budaya menempatkan pendidikan Islam pada posisi strategis untuk membangun generasi yang adaptif tanpa kehilangan identitas keislamannya. Oleh sebab itu, konsep pendidikan Islam inklusif tidak cukup dipahami sebagai pendekatan pedagogis, tetapi sebagai paradigma pendidikan yang mampu menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan masyarakat modern yang plural dan dinamis.

Konsep Inklusivitas dalam Islam sebagai Paradigma Pendidikan

Inklusivitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Konsep ini tidak sekadar dimaknai sebagai sikap menerima keberagaman, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menghargai martabat setiap manusia, membangun relasi yang adil, serta menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Paradigma tersebut berangkat dari pemahaman bahwa Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sehingga nilai-nilai yang dibawanya tidak dibatasi oleh identitas kelompok tertentu, melainkan menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Prinsip tersebut memperoleh legitimasi kuat dalam Al-Qur'an melalui berbagai ayat yang menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari sunnatullah. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, maupun keyakinan dipandang sebagai sarana untuk saling mengenal (*ta'aruf*), bukan sebagai dasar untuk melakukan diskriminasi ataupun dominasi. Perspektif ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah meletakkan fondasi teologis bagi berkembangnya masyarakat yang menghargai pluralitas sekaligus menjunjung tinggi nilai keadilan.

Dalam konteks pendidikan, inklusivitas memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar membuka akses belajar bagi seluruh peserta didik. Pendidikan Islam inklusif menempatkan setiap individu sebagai subjek yang memiliki potensi, hak, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Proses pendidikan diarahkan agar peserta didik mampu memahami ajaran agama secara komprehensif, sekaligus memiliki kemampuan membangun dialog dengan realitas sosial yang beragam. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai proses pewarisan doktrin secara satu arah, melainkan sebagai ruang pembentukan cara berpikir yang terbuka, kritis, dan bertanggung jawab.

Paradigma tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas masyarakat kontemporer. Arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta intensitas interaksi antarbudaya menghadirkan ruang sosial yang jauh lebih heterogen dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini menuntut pendidikan Islam untuk mampu membentuk generasi yang memiliki identitas keagamaan yang kuat tanpa kehilangan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial. Kemampuan menghargai perbedaan, menyelesaikan konflik secara damai, serta bekerja sama lintas identitas menjadi kompetensi yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan Islam pada masa kini.

Implementasi nilai inklusivitas juga menuntut perubahan paradigma dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran. Kurikulum tidak cukup berisi materi-materi normatif

mengenai ajaran Islam, tetapi perlu menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan peserta didik dengan realitas kemajemukan masyarakat. Nilai toleransi, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial perlu diintegrasikan ke dalam seluruh pengalaman belajar, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep-konsep tersebut secara teoritis, tetapi mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan pembelajaran pun perlu bergerak dari pola indoktrinatif menuju pembelajaran dialogis yang mendorong kemampuan berpikir reflektif. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik membangun pemahaman berdasarkan argumentasi ilmiah dan nilai-nilai keislaman. Melalui pendekatan tersebut, pendidikan menjadi media untuk mengembangkan sikap saling menghormati, kemampuan menyampaikan pendapat secara santun, serta kesiapan menerima keberadaan pandangan yang berbeda tanpa kehilangan komitmen terhadap ajaran agama.

Dengan demikian, inklusivitas dalam pendidikan Islam bukan sekadar strategi pedagogis, melainkan paradigma yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial. Pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan spiritual, tetapi juga mampu menjadi agen perdamaian, membangun kehidupan demokratis, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang plural. Paradigma inilah yang kemudian menjadi titik temu berbagai gagasan pembaruan pendidikan Islam, termasuk yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, meskipun keduanya menawarkan pendekatan yang berbeda dalam merealisasikan cita-cita tersebut.

Pemikiran Pendidikan Islam Inklusif Nurcholish Madjid

A. Fondasi Filosofis Pendidikan Islam Inklusif

Pemikiran pendidikan Nurcholish Madjid berangkat dari keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang secara intrinsik mendorong pembebasan intelektual, pengembangan rasionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendidikan tidak diposisikan hanya sebagai proses transmisi ilmu-ilmu keagamaan, tetapi sebagai sarana membentuk manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial. Pandangan tersebut berkembang dari gagasan besar Cak Nur mengenai perlunya melakukan pembaruan pemikiran Islam agar tetap relevan menghadapi perubahan masyarakat modern.

Bagi Nurcholish Madjid, salah satu penyebab stagnasi dunia Islam terletak pada kecenderungan berkembangnya budaya *taqlid* yang membatasi kebebasan berpikir (Muslim, 2021). Tradisi pendidikan yang terlalu menekankan hafalan dan penerimaan otoritas tanpa proses refleksi menyebabkan peserta didik kehilangan kemampuan melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru. Oleh sebab itu, pendidikan harus menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menghargai penggunaan akal sebagai instrumen memahami wahyu sekaligus membaca dinamika kehidupan.

Rasionalitas yang dimaksud Cak Nur bukanlah rasionalisme yang menempatkan akal di atas wahyu, melainkan penggunaan akal sebagai sarana untuk memahami nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam. Hubungan antara wahyu dan akal dipandang bersifat saling melengkapi. Wahyu memberikan orientasi moral, sedangkan akal menjadi instrumen untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan yang terus berubah. Perspektif ini menghasilkan model pendidikan yang tidak terjebak pada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, karena seluruh bentuk pengetahuan dipandang sebagai bagian dari upaya manusia memahami tanda-tanda kebesaran Allah.

Fondasi berikutnya adalah gagasan historisitas Islam. Nurcholish Madjid memandang bahwa penafsiran terhadap ajaran agama selalu berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu (Zaprul Khan, 2025). Karena itu, pendidikan Islam harus mampu membedakan antara nilai-nilai normatif yang bersifat universal dengan bentuk-bentuk historis yang lahir dari konteks sosial tertentu. Kesadaran historis ini memberikan ruang bagi berkembangnya pembaruan pendidikan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Pendidikan tidak diarahkan untuk melestarikan tradisi secara mekanis, tetapi mengembangkan kemampuan peserta didik membaca perubahan zaman melalui perspektif nilai-nilai keislaman.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa inklusivitas dalam pemikiran Nurcholish Madjid berakar pada keterbukaan intelektual. Pendidikan menjadi ruang perjumpaan berbagai gagasan yang mendorong peserta didik mengembangkan argumentasi secara rasional, menghargai perbedaan pandangan, dan membangun sikap moderat dalam memahami ajaran agama. Sikap inklusif lahir bukan karena relativisme terhadap kebenaran, melainkan karena kesadaran bahwa keberagaman merupakan realitas yang harus dihadapi melalui dialog, bukan melalui penolakan ataupun eksklusivisme.

Lebih jauh, Cak Nur menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama pembentukan masyarakat madani (*civil society*). Pendidikan yang berhasil bukan hanya menghasilkan individu yang memiliki prestasi akademik, tetapi juga warga negara yang demokratis, menjunjung tinggi kebebasan berpikir, menghormati hak-hak orang lain, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat plural. Oleh sebab itu, inklusivitas dalam pendidikan menurut Nurcholish Madjid memiliki dimensi epistemologis sekaligus dimensi sosial, karena keduanya saling berkaitan dalam membangun peradaban Islam yang maju.

B. Tujuan Pendidikan Islam Inklusif Menurut Nurcholish Madjid

Bagi Nurcholish Madjid, tujuan utama pendidikan Islam bukan sekadar menghasilkan individu yang menguasai ilmu-ilmu keagamaan, melainkan membentuk manusia yang mampu mengintegrasikan dimensi keimanan, intelektualitas, dan tanggung jawab sosial secara seimbang (Barton, Greg, Edy A. Effendi, 1999). Pendidikan dipandang sebagai proses pemanusiaan (*humanisasi*) yang memungkinkan peserta didik mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui capaian akademik, tetapi juga melalui kematangan moral, keluasan wawasan, dan kemampuan berkontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Pemikiran tersebut lahir dari kritik Cak Nur terhadap kecenderungan pendidikan Islam yang terlalu berorientasi pada aspek formalistik. Menurutnya, proses pendidikan sering kali lebih menekankan kepatuhan terhadap simbol-simbol keagamaan dibandingkan pengembangan substansi ajaran Islam. Akibatnya, peserta didik memiliki pengetahuan agama yang cukup luas, tetapi belum tentu memiliki kemampuan berpikir kritis ataupun sensitivitas terhadap persoalan kemanusiaan. Kondisi semacam ini berpotensi melahirkan eksklusivisme, karena agama dipahami sebagai identitas kelompok, bukan sebagai sumber nilai universal yang membimbing hubungan antarmanusia.

Sebagai alternatif, Nurcholish Madjid menawarkan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia yang merdeka secara intelektual. Kebebasan berpikir dipandang sebagai prasyarat bagi berkembangnya kreativitas dan kemampuan melakukan ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan baru. Pendidikan harus menciptakan ruang yang memungkinkan peserta didik mengemukakan pendapat, melakukan dialog, dan mengembangkan argumentasi

secara rasional tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman. Kebebasan tersebut bukan dimaksudkan untuk melepaskan diri dari wahyu, tetapi menjadi sarana untuk memahami pesan-pesan Islam secara lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada saat yang sama, pendidikan juga diarahkan untuk membangun kesadaran etis. Rasionalitas yang dikembangkan dalam pendidikan tidak boleh berhenti pada kemampuan berpikir logis, melainkan harus menghasilkan tindakan yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, pengembangan intelektual selalu berjalan beriringan dengan pembentukan karakter. Peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan menganalisis berbagai persoalan sosial, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk mengambil keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Islam menurut Nurcholish Madjid memiliki dimensi transformasional. Pendidikan tidak dimaksudkan untuk mempertahankan struktur sosial yang sudah ada, tetapi menjadi instrumen perubahan menuju masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan berkeadaban. Dalam perspektif ini, sekolah dan lembaga pendidikan berfungsi sebagai ruang pembentukan budaya dialog yang memungkinkan peserta didik belajar menghargai keberagaman pandangan, membangun kerja sama, serta menyelesaikan perbedaan melalui argumentasi yang rasional. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting bagi berkembangnya masyarakat plural yang mampu menjaga kohesi sosial tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing.

Di tengah meningkatnya tantangan polarisasi, penyebaran ujaran kebencian, dan menguatnya eksklusivisme keagamaan, tujuan pendidikan yang dirumuskan Nurcholish Madjid tetap memiliki relevansi yang tinggi. Pendidikan Islam dituntut menghasilkan generasi yang tidak hanya memahami ajaran agamanya secara mendalam, tetapi juga mampu berinteraksi secara konstruktif dengan berbagai kelompok sosial yang berbeda. Kemampuan tersebut menjadi modal penting dalam membangun kehidupan bersama yang damai di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Dengan demikian, inklusivitas dalam pemikiran Cak Nur bukan sekadar sikap toleran terhadap perbedaan, melainkan konsekuensi logis dari pendidikan yang berhasil membentuk manusia yang dewasa secara intelektual, matang secara spiritual, dan bertanggung jawab secara sosial.

C. Kurikulum dan Metodologi Pendidikan dalam Perspektif Nurcholish Madjid

Implikasi dari paradigma pendidikan yang dikembangkan Nurcholish Madjid terlihat pada cara ia memandang kurikulum dan proses pembelajaran. Kurikulum tidak seharusnya dibatasi pada penguasaan materi-materi keagamaan secara tekstual, tetapi perlu dirancang sebagai instrumen yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan dinamika kehidupan masyarakat. Integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern menjadi salah satu karakter utama pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum justru dipandang sebagai hambatan bagi lahirnya generasi Muslim yang memiliki kompetensi intelektual sekaligus kedalaman spiritual.

Menurut Cak Nur, seluruh cabang ilmu pada hakikatnya merupakan bagian dari ikhtiar manusia memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh sebab itu, pendidikan Islam perlu memberikan ruang yang sama bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial, sains, teknologi, maupun humaniora tanpa menghilangkan orientasi etik yang bersumber dari ajaran Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik memahami bahwa agama tidak bertentangan dengan

modernitas, melainkan menjadi landasan moral dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan kemanusiaan.

Dari sisi metodologi, proses pembelajaran perlu meninggalkan pola pedagogi yang bersifat otoriter dan satu arah. Hubungan guru dan peserta didik dibangun melalui dialog yang mendorong tumbuhnya budaya berpikir kritis. Guru tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya pemilik otoritas pengetahuan, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengeksplorasi berbagai perspektif secara ilmiah dan bertanggung jawab. Pendekatan dialogis tersebut diyakini mampu mengembangkan kemampuan reflektif sekaligus membangun sikap saling menghargai terhadap keberagaman pandangan.

Kurikulum yang demikian pada akhirnya tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, tetapi juga individu yang mampu menghubungkan ajaran Islam dengan realitas sosial secara kreatif (Rachman & Budi, 2011). Pendidikan menjadi ruang pembentukan intelektual Muslim yang terbuka terhadap perubahan, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan global, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam. Karakter inilah yang menurut Nurcholish Madjid menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pendidikan Islam yang inklusif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pemikiran Pendidikan Islam Inklusif Menurut Abdurrahman Wahid

A. Fondasi Filosofis Pendidikan Islam Inklusif

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan salah satu pemikir Muslim Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang demokratis, plural, dan berkeadaban. Berbeda dengan pendekatan yang menekankan aspek normatif semata, Gus Dur memandang pendidikan Islam sebagai proses pembentukan manusia yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam kehidupan sosial. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk menghormati keberagaman, memperjuangkan keadilan, dan menjaga martabat setiap manusia tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, maupun budaya.

Pandangan tersebut berangkat dari keyakinannya bahwa Islam memiliki karakter yang inklusif dan terbuka terhadap realitas sosial yang beragam. Menurut Gus Dur, keberagaman bukanlah penyimpangan yang harus diseragamkan, melainkan kenyataan historis yang menjadi bagian dari kehendak Allah. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu membentuk cara pandang yang menghargai pluralitas sebagai kekayaan sosial sekaligus ruang untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bersama. Sikap keberagaman yang eksklusif justru dipandang bertentangan dengan misi Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Fondasi pemikiran tersebut tidak dapat dipisahkan dari latar belakang intelektual Gus Dur yang tumbuh dalam tradisi pesantren, namun pada saat yang sama memperoleh pengalaman akademik dan sosial yang luas di berbagai lingkungan internasional. Perjumpaan antara khazanah klasik Islam dengan pemikiran modern membentuk perspektif yang memadukan penghormatan terhadap tradisi dengan keterbukaan terhadap perubahan. Gus Dur tidak melihat tradisi sebagai sesuatu yang harus dipertahankan secara kaku, tetapi sebagai sumber nilai yang dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah.

Salah satu gagasan yang paling berpengaruh dalam pemikirannya adalah konsep *pribumisasi Islam*. Melalui konsep ini, Gus Dur menegaskan bahwa ajaran Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk budaya yang seragam. Nilai-nilai Islam dapat hadir dan berkembang melalui budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam perlu menghargai keragaman budaya sebagai media internalisasi nilai-nilai keagamaan, bukan sebagai hambatan bagi pelaksanaan ajaran Islam. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan kemampuan Islam untuk berdialog dengan berbagai tradisi lokal tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Humanisme menjadi fondasi lain yang sangat menonjol dalam pemikiran Gus Dur. Pendidikan diarahkan untuk membangun penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam. Keimanan yang autentik tidak hanya tercermin melalui pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kelompok yang lemah, penghormatan terhadap kebebasan beragama, serta komitmen untuk menciptakan kehidupan sosial yang adil. Oleh sebab itu, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab membentuk peserta didik yang tidak hanya saleh secara individual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial terhadap berbagai persoalan kemanusiaan.

Dalam perspektif tersebut, inklusivitas bukan dipahami sebagai sikap kompromistis terhadap nilai agama, melainkan sebagai manifestasi dari kedalaman pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri. Semakin baik seseorang memahami substansi Islam, semakin besar pula kemampuannya menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang majemuk. Pendidikan menjadi ruang strategis untuk menanamkan kesadaran tersebut melalui proses pembelajaran yang menumbuhkan empati, dialog, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Pandangan Gus Dur memiliki relevansi yang semakin kuat dalam konteks masyarakat kontemporer yang ditandai oleh meningkatnya polarisasi identitas dan berbagai bentuk intoleransi. Pendidikan Islam tidak cukup menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga harus membentuk warga negara yang mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat plural. Dengan demikian, fondasi pendidikan Islam yang dikembangkan Gus Dur berorientasi pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi ajaran Islam.

B. Tujuan Pendidikan Islam Inklusif Menurut Abdurrahman Wahid

Menurut Abdurrahman Wahid, tujuan pendidikan Islam tidak berhenti pada pembentukan individu yang taat menjalankan kewajiban keagamaan, tetapi diarahkan untuk melahirkan manusia yang mampu menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial secara nyata. Pendidikan harus membentuk pribadi yang memiliki keseimbangan antara kedalaman spiritual, keluasan intelektual, serta kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui penguasaan ilmu agama, tetapi juga melalui kemampuan peserta didik membangun relasi sosial yang adil, toleran, dan menghargai keberagaman.

Gus Dur mengkritik model pendidikan Islam yang terlalu menekankan aspek formal dan simbolik, sementara dimensi etika sosial kurang memperoleh perhatian. Pendidikan semacam itu berpotensi menghasilkan individu yang memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi belum mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat yang plural. Oleh karena itu, pendidikan perlu menggeser orientasi dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembentukan kesadaran sosial yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Tujuan pendidikan menurut Gus Dur juga berkaitan erat dengan penguatan demokrasi dan kehidupan masyarakat sipil. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berdialog, menghargai perbedaan pendapat, serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu. Pendidikan menjadi wahana untuk membangun

budaya demokratis yang berakar pada ajaran Islam, bukan sekadar mengadopsi konsep-konsep modern secara normatif. Dengan cara tersebut, nilai-nilai demokrasi dipahami sebagai bagian dari implementasi prinsip keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan persamaan derajat manusia yang diajarkan Islam.

Aspek lain yang memperoleh perhatian besar adalah pemberdayaan kelompok masyarakat yang selama ini mengalami marginalisasi. Gus Dur memandang pendidikan memiliki fungsi emansipatoris, yaitu membuka kesempatan yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat untuk memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Pendidikan tidak boleh menjadi instrumen yang memperkuat ketimpangan sosial, tetapi harus menjadi sarana untuk memperluas keadilan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Orientasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam menurut Gus Dur memiliki karakter yang sangat kontekstual. Nilai-nilai agama diterjemahkan menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan, diskriminasi, konflik identitas, dan rendahnya kualitas kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak hanya membentuk individu yang saleh secara personal, tetapi juga melahirkan agen perubahan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi lingkungan sekitarnya. Perspektif inilah yang menjadikan pemikiran Gus Dur memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan pendidikan Islam moderat di Indonesia hingga saat ini.

C. Kurikulum dan Metodologi Pendidikan dalam Perspektif Abdurrahman Wahid

Implikasi pemikiran Abdurrahman Wahid terhadap pendidikan Islam tercermin pada cara ia memandang kurikulum sebagai instrumen pembentukan manusia yang utuh. Kurikulum tidak hanya berfungsi menyampaikan seperangkat pengetahuan keagamaan, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Pendidikan Islam menurut Gus Dur harus mampu menghubungkan ajaran normatif Islam dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga peserta didik memiliki kemampuan memahami agama secara kontekstual sekaligus responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Gus Dur menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kedua bidang keilmuan dipandang memiliki posisi yang sama penting dalam membentuk kualitas manusia. Ilmu-ilmu keislaman memberikan landasan etik dan spiritual, sedangkan ilmu pengetahuan modern menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan kehidupan secara rasional. Integrasi keduanya diperlukan agar pendidikan Islam tidak melahirkan individu yang hanya unggul secara intelektual tetapi miskin sensitivitas sosial, ataupun sebaliknya, memiliki semangat religius yang tinggi namun kurang mampu menghadapi dinamika perubahan global.

Salah satu karakter yang membedakan pemikiran Gus Dur adalah keberpihakannya terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari proses pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai Islam dapat tumbuh secara lebih efektif ketika dikontekstualisasikan dengan budaya masyarakat. Pendidikan tidak harus menghilangkan identitas lokal demi mencapai keseragaman, melainkan memanfaatkan kekayaan budaya sebagai media pembelajaran yang memperkuat internalisasi nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami bahwa agama hadir untuk menyempurnakan nilai-nilai luhur masyarakat, bukan menghapus seluruh tradisi yang telah berkembang.

Dari sisi metodologi, Gus Dur lebih menekankan pembelajaran yang dialogis, partisipatif, dan humanis. Relasi antara guru dan peserta didik dibangun atas dasar penghormatan terhadap kebebasan berpikir dan martabat manusia. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu,

tetapi juga sebagai teladan moral yang mampu membimbing peserta didik memahami kehidupan secara lebih luas. Proses pembelajaran perlu membuka ruang diskusi, refleksi, dan pertukaran gagasan sehingga peserta didik terbiasa melihat suatu persoalan dari berbagai perspektif tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai Islam.

Metodologi tersebut juga memperkuat budaya toleransi dalam lingkungan pendidikan. Perbedaan pendapat dipandang sebagai bagian yang wajar dalam proses pencarian ilmu, bukan sebagai ancaman terhadap kebenaran agama. Oleh karena itu, pembelajaran harus mendorong kemampuan berdialog, menyampaikan argumentasi secara santun, serta menghargai pandangan yang berbeda. Lingkungan belajar yang demikian menjadi fondasi penting bagi pembentukan karakter moderat yang mampu hidup berdampingan dalam masyarakat plural.

Lebih jauh, Gus Dur memandang bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya terlihat dari prestasi akademik peserta didik, tetapi juga dari kemampuan mereka menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Pendidikan harus melahirkan individu yang memiliki kepedulian terhadap kelompok rentan, menghargai hak-hak setiap manusia, serta berkomitmen menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Islam bukan sekadar proses akademik, melainkan proses pembentukan peradaban yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, gagasan Gus Dur menawarkan paradigma yang relevan untuk menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya intoleransi, polarisasi sosial, serta berkembangnya narasi keagamaan yang eksklusif. Pendidikan yang menempatkan pluralitas sebagai realitas sosial dan kemanusiaan sebagai orientasi utama diyakini mampu menghasilkan generasi Muslim yang tetap teguh pada identitas keagamaannya, namun terbuka terhadap dialog, mampu bekerja sama lintas identitas, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadaban.

Analisis Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

Setelah menguraikan pemikiran kedua tokoh, terlihat bahwa Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid memiliki orientasi yang sama dalam mengembangkan pendidikan Islam yang inklusif, meskipun keduanya berangkat dari latar intelektual dan pendekatan yang berbeda. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa inklusivitas bukanlah konsep yang berada di luar tradisi Islam, melainkan berkembang dari upaya mereaktualisasi nilai-nilai universal Islam agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern. Perbedaan yang muncul lebih banyak terletak pada titik tekan dan strategi implementasi daripada pada tujuan yang hendak dicapai.

Secara umum, Nurcholish Madjid membangun paradigma pendidikan inklusif melalui pendekatan epistemologis. Fokus utamanya adalah pembaruan cara berpikir umat Islam melalui penguatan rasionalitas, kebebasan intelektual, dan keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan dipandang sebagai proses pembebasan intelektual yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis sehingga mampu melakukan pembacaan kontekstual terhadap ajaran Islam. Dalam perspektif ini, inklusivitas lahir dari kematangan intelektual yang memungkinkan seseorang menghargai perbedaan tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman.

Sebaliknya, Abdurrahman Wahid lebih menempatkan pendidikan inklusif dalam kerangka praksis sosial. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam melalui penghormatan terhadap pluralitas, perlindungan hak-hak kelompok minoritas, penguatan demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Inklusivitas menurut Gus Dur bukan hanya persoalan cara berpikir, tetapi juga tercermin dalam tindakan

nyata yang menghadirkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh sebab itu, pendidikan memiliki fungsi transformasi sosial yang sangat kuat dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadaban.

Walaupun memiliki titik tekan yang berbeda, kedua tokoh sama-sama menolak model pendidikan Islam yang bersifat eksklusif dan formalistik. Mereka berpandangan bahwa pendidikan yang hanya berorientasi pada hafalan, simbol, atau identitas keagamaan tidak cukup untuk menjawab tantangan masyarakat modern. Pendidikan Islam harus mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, memperkuat karakter, serta membangun tanggung jawab sosial sehingga peserta didik mampu hidup secara harmonis di tengah keberagaman.

Perbandingan tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Kedua Tokoh

Aspek	Nurcholish Madjid	Abdurrahman Wahid
Fondasi pemikiran	Rasionalitas, pembaruan pemikiran Islam, keterbukaan intelektual	Humanisme Islam, pluralisme, keadilan sosial
Orientasi pendidikan	Pembebasan intelektual	Transformasi sosial
Fokus utama	Pengembangan cara berpikir kritis	Penguatan toleransi dan kemanusiaan
Kurikulum	Integrasi ilmu agama dan ilmu modern	Integrasi nilai Islam dengan budaya lokal dan realitas sosial
Metodologi	Dialogis, reflektif, kritis	Humanis, partisipatif, kontekstual
Tujuan akhir	Muslim modern yang terbuka dan rasional	Muslim humanis yang inklusif dan berkeadaban

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa pemikiran kedua tokoh tidak bersifat saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Pendekatan Nurcholish Madjid memberikan landasan epistemologis melalui penguatan budaya berpikir kritis dan keterbukaan intelektual, sedangkan Abdurrahman Wahid menawarkan dimensi praksis melalui implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Integrasi kedua perspektif tersebut menghasilkan model pendidikan Islam inklusif yang tidak hanya mampu membangun kualitas intelektual peserta didik, tetapi juga memperkuat sensitivitas sosial, komitmen terhadap keadilan, dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang plural.

Temuan ini menjadi kontribusi utama penelitian, yaitu menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Islam inklusif di Indonesia memerlukan sintesis antara pembaruan intelektual dan transformasi sosial. Pendidikan tidak cukup diarahkan untuk menghasilkan individu yang memahami ajaran Islam secara benar, tetapi juga individu yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam menjadi praktik kehidupan yang menghargai keberagaman, memperjuangkan keadilan, dan membangun perdamaian. Paradigma integratif tersebut memberikan alternatif konseptual yang relevan bagi pengembangan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global berupa polarisasi identitas, intoleransi, serta perubahan sosial yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid memiliki orientasi yang sama dalam membangun paradigma pendidikan Islam yang inklusif, meskipun keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda. Nurcholish Madjid menempatkan

rasionalitas, kebebasan berpikir, dan keterbukaan intelektual sebagai fondasi pembaruan pendidikan Islam sehingga peserta didik mampu memahami ajaran Islam secara kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya, Abdurrahman Wahid menitikberatkan pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada pluralisme, toleransi, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.

Analisis komparatif memperlihatkan bahwa perbedaan keduanya tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi. Perspektif Nurcholish Madjid memberikan landasan epistemologis melalui penguatan budaya berpikir kritis, sedangkan Abdurrahman Wahid menawarkan dimensi praksis melalui implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial yang plural. Integrasi kedua perspektif tersebut menghasilkan model pendidikan Islam inklusif yang mampu mengembangkan kompetensi intelektual, kedewasaan spiritual, sekaligus tanggung jawab sosial peserta didik.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan pendidikan Islam pada era kontemporer memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga pada pembentukan karakter moderat, kemampuan berdialog, penghormatan terhadap keberagaman, serta komitmen terhadap kemanusiaan universal. Model pendidikan semacam ini memiliki relevansi yang kuat dalam merespons tantangan global berupa polarisasi identitas, intoleransi, dan meningkatnya eksklusivisme keagamaan.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis konseptual terhadap pemikiran dua tokoh melalui kajian kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi gagasan pendidikan Islam inklusif dalam kurikulum, pembelajaran di pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi Islam, sehingga relevansi pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dapat diuji secara lebih komprehensif dalam praktik pendidikan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. K. (2024). The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/J.GLMEDI.2024.100051>
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khahir, R. M. (2025). Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(2), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.gmedi.2025.100198>
- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13
- Auzi, C., Saragi, D., & Ndonga, Y. (2024). Peran Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme pada Kalangan Siswa Sekolah Dasar. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(02), 721–729. <https://doi.org/10.47709/EDUCENDIKIA.V4I02.4795>
- Barton, Greg, Edy A. Effendi, N. T. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran neo Modernisme, Nurcholish Madjid, Djoko Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*. 607 hlm.

https://books.google.com/books/about/Gagasan_Islam_liberal_di_Indonesia.html?hl=id&id=BwOkAAAACAAJ

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 5th Edition*. 552.
- Fakhrudin Al-Razi, M., Madjid, A., & Hadziq Madani Ilham Khalil, A. (2024). Reconstructing the Islamic Education Paradigm in Indonesia. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 22(2), 294–310. <https://doi.org/10.32729/EDUKASI.V22I2.1918>
- Fatmawati, E., Suharto, B., Dahlan, M., Suhma, W. K., & Yudiawan, A. (2023). Challenges of Educational Management in the Islamic Higher Education Sector Based on Pesantren. *Journal of Educational and Social Research*, 13(6), 105–118. <https://doi.org/10.36941/JESR-2023-0151>
- Jamil, Z. A., Nurhuda, Alfian, Ulfah, S. M., Rasidin, & Youssef, A. (2025). Program Evaluation Study on Islamic Religious Education in Pesantren: Addressing Educational Degradation in the Digital Era. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 22(1), 122–139. <https://doi.org/10.14421/JPAI.V22I1.11358>
- Juliani, J., Mahdi, H., Widya Sari, S., Indah Sari, S., & Raihanun Nazwa, N. (2024). Green Islamic School: Integrating Environmental Education in the Islamic Education Curriculum. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 3(3), 565–574. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v3i3.270>
- Lidyaningsih, W., & Hanif, Muh. (2023). Nurcholish Madjid's Ideas on Renewal of Islamic Education in Indonesia. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 6(2), 223–241. <https://doi.org/10.20885/IJIIS.VOL6.ISS2.ART6>
- Mahrus, & Itqon, Z. (2024). Literasi Digital Islami: Upaya Menangkal Radikalisme di Kalangan Pelajar. *RABBAYANI: Jurnal Pendidikan Dan Peradaban Islami*, 4(2), 87–98. <https://doi.org/10.32478/TENDDT32>
- Mandala, I., Witro, D., & Juraidi, J. (2024). Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024: Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme dan Ekstremisme di Era Disrupsi. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 127–160. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1242>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Mundiri, A., Sain, Z. H., & Khomairohtusshiyamah, U. (2025). Reconstructing Transformational Leadership through Islamic Values: A Model for Improving Institutional Performance in Islamic Education. *Mozaic: Islam Nusantara*, 11(2), 125–136. <https://doi.org/10.47776/MOZAIC.V11I2.1829>
- Muslim, A. (2021). *Nurcholish Madjid dan Politik Muslim*. <https://divapress-online.com/book/nurcholish-madjid-dan-politik-muslim>
- Nurhidayah, U. K., & Supratno, H. (2023). Adab as an Epistemological Paradigm in Islamic Education: Reexamining KH. Hasyim Asy'ari's Thought in Adab al Alim wa al-Muta'allim.

Journal of Islamic Education and Pesantren, 3(2), 114–124.
<https://doi.org/10.33752/JIEP.V3I2.11540>

- Prasetyowati, F., Saniya, U. M., Fauzia, S., & Susilawati, S. (2025). Transformative Leadership for Integrating Islamic Values and 21st Century Skills: A Conceptual Framework for Contemporary Islamic Education. *Journal of Islamic Education Management Research*, 3(1), 29–41. <https://doi.org/10.14421/JIEMR.2025.31-03>
- Pratama, D. A. (2023). Islam and Neo-Modernism in Indonesia: Revisiting Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid's Thought on Civil Society. *Al'Adalah*, 26(2), 155–173. <https://doi.org/10.35719/ALADALAH.V26I2.371>
- Rachman, M., & Budi, M. (2011). Ensiklopedi Nurcholish Madjid - Jilid 1 A-G. *Yayasan Abad Demokrasi*, 1070. https://books.google.com/books/about/ENSIKLOPEDIA_NURCHOLISH_MADJID.html?id=bd0xEAAAQBAJ
- Rahman, N. A., & Azzahra, A. (2024). The Role of Islamic Education in Preserving Cultural Identity Amidst Global Modernity. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(4), 257–271. <https://doi.org/10.61194/IJIS.V2I4.707>
- Ridwan, M., Salam, A., Aspandi, A., & Muttaqin, M. A. (2025). *Productive Zakat Governance Model for Improving the Quality of Islamic Education*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/7774>
- Sirojuddin, A., Maskuri, Ghoni, J., & Hosna, R. (2025). Holistic Curriculum Integration Model for Islamic Boarding Schools and Higher Education. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 107–128. <https://doi.org/10.24042/002025162646300>
- Tumiran, Siregar, B., Agustia, N. R., & Azhari, F. (2024). *Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Digitalisasi (Studi Kasus di Mas Tarbiyah Islamiyah Kec. Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang)*. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4619144>
- Wulandari, A. T., Karinah, K., Ariyani, N., & Kusumaningrum, H. (2024). Mengenal Strategi Efektif Manajemen Kurikulum di Era Digital. *JUPIN (Jurnal Pendidikan Islam Nusantara)*, 3(02), 157–170. <https://doi.org/10.30599/JUPIN.V3I02.1056>
- Zaprul Khan. (2025). *Pembaruan Islam: Mewarisi Kearifan Pemikiran Cak Nur, Sang Guru Bangsa*. <https://divapress-online.com/book/pembaruan-islam-mewarisi-kearifan-pemikiran-c>